



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES  
KOMISI X DPR RI  
MASA RESES PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022-2023  
KE PROVINSI SULAWESI TENGGARA (KENDARI)  
TANGGAL 24 S.D. 28 OKTOBER 2022**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. Pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
2. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
3. Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI; Pasal 59 ayat (4) tentang tugas komisi di bidang pengawasan; Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang pelaksanaan kunjungan kerja Komisi DPR RI;
4. Keputusan Pimpinan DPR RI tentang penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Masa Reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022;
5. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 22 Agustus 2022 tentang Rencana Kunjungan Kerja Komisi X DPR-RI Masa Reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke ke Provinsi Lampung, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Gorontalo.

**B. Maksud dan Tujuan**

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari Pejabat Daerah mengenai implementasi undang-undang dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah, menggali dan menyerap aspirasi dari daerah, dan mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan berbagai persoalan tentang pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara khusus, kunjungan ini bertujuan memantau secara langsung terhadap kendala dan permasalahan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengambilan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan dalam masa pandemi dan pasca *Covid 19*.

**C. Tim Kunjungan Kerja**

Tim Kunjungan Kerja Masa Reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 oleh Komisi X DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP disertai anggota Komisi X DPR RI dari berbagai unsur fraksi didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta Tim Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Tim didampingi oleh Pejabat dari Mitra Kerja Komisi X DPR RI:

1. Dr. Sutanto, S.H., M.A. (Ses.Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbudristek RI);
2. Selliane Halia Ishak, S.Kom., M.Si. (Sekretaris Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Beparekraf RI);
3. Ir. Oni Yulfian, MBTM (Sekretaris Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf RI);
4. Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si, DFM. (Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kemenpora RI);
5. Dr. Adin Bondar, S.Sos., M.Si. (Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, Perpunas RI);

#### **D. Jadwal Kunjungan Kerja**

1. Melakukan pertemuan di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara yang dihadiri:
  - a. H. Ali Mazi, S.H. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.
  - b. Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara.
  - c. Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D. Kadinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara merangkap sebagai Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
  - d. H. Trio Prasetio Prahasto, S.Sos., M.AP. Plt. Kadinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara.
  - e. Beli Harli Tombili, Kadinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara.
  - f. Nur Saleh, S.Pd., M.M. Pub. Kedinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Tenggara.
  - g. Prof. Dr. Hanna, M.Pd. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara.
  - h. Dr. Nur Arafah, Wakil Rektor III Bidang Mahasiswa dan Alumni UHO.
  - i. Awaluddin Keala, S.Pd., M.Pd. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Peninjauan ke SMA Negeri I Kendari, Taman Kanak-Kanak Kuncup Pertiwi Kota Kendari, dan Ekraf Dekranasda Kota Kendari.

## **II. TEMUAN DATA**

### **A. Bidang Pendidikan**

#### **1) Wajib Belajar 12 Tahun**

1. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program prioritas untuk memenuhi aksesibilitas anak usia sekolah menuntaskan Wajib Belajar 12 Tahun. Pelaksanaan PIP di Provinsi Sulawesi Tenggara, disampaikan secara tertulis, bahwa berdasarkan diskusi dengan Dinas Sosial, pendataan siswa miskin tidak *terupdate* sehingga ada siswa yang tidak menerima haknya. Selain itu penerimaan/penyaluran PIP tidak tepat waktu, ada siswa yang sudah tamat tidak menerima PIP-nya, jarak bank penyalur yang terlalu jauh sehingga banyak dana PIP yang tidak tersalur dan menumpuk di bank (BNI). Keterlibatan Provinsi adalah menyampaikan daftar nama penerima PIP pada sekolah bersangkutan untuk selanjutnya disampaikan ke siswa bersangkutan. Perkiraan jumlah siswa miskin di Sulawesi Tenggara sebanyak 50.000 orang sedangkan yang saat ini mendapatkan PIP sebanyak 30.417

siswa. Pada umumnya aktivasi tidak menjadi masalah Karena BNI membuka program *road to school* dan membuka pelayanan sampai hari sabtu. Beasiswa miskin dari dana APBD sebanyak 1.536 orang.

2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS), berjalan sesuai petunjuk teknis dan merupakan satu-satunya pembiayaan di sekolah. Masalah: keterlambatan pelaporan aset karena minimnya tenaga Tata Usaha di sekolah. Kepala sekolah dibantu bendahara dari guru merangkap sebagai pelaksana administrasi sehingga rawan penyalahgunaan dan kurang transparan.

## 2) Sarana Prasarana

- a. DAK SMA,SMK,SLB terlaksana sesuai prosedur yang berlaku. Tahun 2021 dilaksanakan secara kontraktual namun kenyataannya kualitas bangunan yang kurang memadai. Tahun 2022 DAK dilaksanakan secara swakelola. Kuota DAK perlu ditambah mengingat banyaknya sekolah yang rusak dimakan usia. Perlu dianggarkan kembali pembangunan infrastruktur berskala besar dalam bentuk renovasi SMA SMK SLB melalui Kementerian PUPR.

b.

NO	MASALAH	USULAN
1	Banyaknya sarana prasarana sekolah yang rusak dimakan usia ( Ruag kelas, laboratorium, perpustakaan,kantin, ruang osis, asrama guru dll )	Perlu peningkatan alokasi DAK FISIK SMA,SMK,SLB
2	Lebih dari 50% kantor sekolah dan ruang guru yang rusak dimakan usia	Perlunya penganggaran renovasi/revitalisasi berskala besar melalui Kemen PUPR
3	Masih banyak USB yang dibutuhkan terutama di daerah terpencil (3T), daerah perkotaan padat penduduk dan daerah bencana	Persyaratan 1 kecamatan 1 USB pada menu DAK SMA/SMK agar ditinjau ulang mengingat pada kecamatan padat penduduk diperlukan lebih dari 1 USB
4	Mobiler SMA,SMK,SLB sangat kurang ( DARURAT MOBILER)	Perlu dianggarkan pengadaan dan rehabilitasi mobiler SMA,SMK,SLB secara besar-besaran
5	Komputer (PC) SMA,SMK,SLB sangat kurang	Perlu dianggarkan pengadaan komputer (PC) SMA,SMK,SLB secara besar-besaran

## 3) Pelaksanaan Kurikulum

- a. Saat ini kurikulum yang berlaku pada umumnya masih Kurikulum 2013. Perlu intervensi dan peningkatan kapasitas SDM agar bisa dilaksanakan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Muatan Lokal juga perlu mendapat perhatian lebih, saat sudah mulai dianggarkan pada APBDP 2022.
- b. Implementasi Kurikulum merdeka belajar: Guru Penggerak dan Sekolah penggerak masih sangat kurang. Belum ada intervensi Pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka. Saat ini masih didominasi oleh Kurikulum Merdeka kategori Mandiri Belajar.

## 4) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Pada umumnya terlaksana dengan baik sesuai petunjuk teknis dengan menggunakan aplikasi PPDB lokal. Masalah daya tampung sekolah favorit dan rekayasa alamat telah dapat diatasi dengan kerjasama dukcapil serta pembangunan USB pada daerah padat penduduk.

- 5) **Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)**  
Banyaknya sekolah negeri dan swasta dengan sarana prasarana yang kurang memadai. Jumlah siswa lebih banyak dari jumlah penduduk yang mengalami ketunaan sehingga menyebabkan anomali dalam penghitungan Angka partisipasi PKLK. Kurangnya jumlah guru dengan kompetensi SLB saat ini diatasi dengan pemberian beasiswa pada 20 orang guru SLB untuk mengikuti pendidikan S1 ke 2 khusus untuk kompetensi SLB. Banyaknya masyarakat yang menderita sindrom AUTISME. Saat ini dilayani oleh pusat layanan Autis Provinsi Sulawesi Tenggara berpusat di Jl. Kijang Anduonohu Kendari. Selain itu terapi autis dilayani oleh swasta dengan biaya yang cukup mahal. Berdasarkan data yang mendaftar pada pusat layanan AUTIS saat ini sebanyak 200 anak yang mampu dilayani therapy, sedangkan daftar tunggu sekitar 150 anak, selain itu kurangnya tenaga therapists di Pusat Layanan Autis. Saat ini berjumlah 3 orang tenaga therapists berstatus Honorer.
- 6) **Pendidikan Vokasi**  
Kurangnya guru produktif SMK, kurangnya alat peraga dan praktek siswa, tidak adanya dukungan anggaran uji kompetensi siswa, tidak tersedianya lembaga sertifikasi kompetensi bagi siswa sehingga kompetensi siswa tidak diakui oleh dunia kerja dan dunia industri. Belum ada SMK yang menjadi BLUD.
- 7) **Pembelajaran Tatap Muka (PTM)**  
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) telah dilaksanakan secara penuh ( 100%) pada semua sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun pelajaran 2022/2023.
- 8) **Pemberian Vaksin bagi Pemangku Kepentingan Bidang Pendidikan**  
Vaksin Covid 19 telah dilaksanakan pada siswa, guru, dan seluruh warga sekolah. Selain itu telah dilaksanakan pemberian pil tambah darah untuk siswa perempuan untuk mencegah stunting.
- 9) **Rekrutman Tenaga ASN P3K**  
Rekrutmen ASN dan P3K telah dilaksanakan tahun 2020 (yang lulus 24 orang) dan 2021 (yang lulus 528 orang), sedangkan pengangkatan guru ASN belum ada sejak tahun 2020. Saat ini Sulawesi Tenggara masih kekurangan Guru dan Tenaga Kependidikan dengan status ASN dan P3K yaitu guru mata pelajaran, Guru produktif SMK, guru kompetensi SLB, tenaga penunjang laboratorium, Tata Usaha Sekolah, pustakawan, satpan, operator, pengawas sekolah dan tenaga lainnya. Formasi Guru P3K tahun 2023 sebanyak 1.462 orang. Saat ini Sultra kekurangan guru sekitar 5000 orang. Untuk mengatasi kekurangan guru, Pemerintah Prov.Sultra mengangkat Guru Honorer sebanyak 3.750 orang dengan honor bulan Rp. 500.000 per guru dengan total anggaran Rp. 22.500.000.000 sejak tahun 2018 hingga saat ini.

NO	MASALAH	SOLUSI PEMDA	USULAN
1	Kurangnya Jumlah Guru Mapel Umum SMA,SMK,SLB	Pengangkatan guru Honorer dengan SK Gubernur 3.750 orang	Pengangkatan guru Mapel Umum di SMA,SMK, SLB
2	Kurangnya jumlah guru Produktif SMK	Memfaatkan praktisi dari DUDI	Pengangkatan guru Produktif SMK
3	Kurangnya jumlah guru kompetensi SLB	Kerjasama dengan UNM untuk program Beasiswa S1 ke 2 bagi guru SLB	Pengangkatan guru dengan kompetensi SLB
4	Kurangnya tenaga Kependidikan dan tenaga penunjang di sekolah ( Pengawas, Tata Usaha, Laboran, Operator )	Sekolah mengangkat tenaga honorer	Pngangkatan tenaga kependidikan
5	Rendahnya kualitas dan kompetensi guru	Membangun Pusat pelatihan guru	Perlunya pelatihan peningkatan kompetensi guru secara besar-besaran

10) **Usulan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)**

Anggaran pendidikan sesuai amanah UUD 1945 sebesar 20% agar diberikan batas yang tegas 20% APBN dan 20% APBD bukan gabungan kedua sumber dana tersebut. Saat ini yang terjadi adalah APBN yang masuk ke postur APBD dalam bentuk dana transfer ( gaji, DAK Fisik, DAK non fisik, BOS) masuk ke postur APBD sehingga alokasi 20% APBD termasuk dana transfer tersebut. Makin besar dana transfer APBN maka makin kecil Alokasi APBD murni.

**B. Bidang Kebudayaan**

- a. Setelah pandemi Covid 19, pemajuan kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan melalui pemugaran dan rehabilitasi cagar dan situs budaya (makam, benteng, rumah adat malige, rumah adat kamali, baruga katelemendo dll), Napak tilas Oputa yikoo, seminar kebudayaan, pentas-pentas lagu daerah dan tari tradisional serta pemugaran museum, pemberian bantuan sarpras pada sanggar kebudayaan
- b. *Recovery* kegiatan kebudayaan dilakukan pada berbagai elemen masyarakat, dengan kegiatan yang terprogram pada bidang Kebudayaan dan pada UPTD Museum Taman Budaya Provisi Sulawesi Tenggara, dengan anggaran bersumber dari DAK Museum Taman Budaya dan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu ada 9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki jurusan yang spesifik terkait dengan pemajuan kebudayaan menyebar pada 6 kota/kabupaten, yaitu Kota Kendari, Kota Baubau, Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe. Kendala utama adalah minimnya tenaga ahli budaya pada Dinas Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara, Sanggar-sanggar kebudayaan yang ada di masyarakat banyak yang tidak memiliki izin operasional sehingga sulit mendapatkan bantuan.
- c. Proses pencatatan dan pendokumentasian kebudayaan dilakukan dengan cara registrasi manual melalui buku registrasi koleksi, reinventarisasi dan perawatan koleksi, registrasi online melalui system registrasi nasional museum, digitalisasi warisan budaya tak benda (WBTB) dalam bentuk video seperti upacara adat pernikahan, Lulo nganda, mosehe, lariangi, kumohu dll.

### C. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pemda tidak memberikan jawaban tertulis terhadap daftar pertanyaan yang disampaikan sebelum kunjungan kerja dilaksanakan.

### D. Bidang Pemuda dan Olahraga

1. Pelaksanaan program kepemudaan yang telah dilakukan Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara, antara lain:
  - 1) Membangun pemuda yang memiliki karakter kebangsaan, mandiri, berdaya saing dan berperan aktif bagi kemajuan daerah (Indonesia), hal yang harus dilakukan :
    - a. Peningkatan karakter dan kualitas pemuda;
    - b. Peningkatan kemandirian dan daya saing pemuda;
    - c. Peningkatan peran aktif pemuda dalam segala aspek pembangunan;
    - d. Peningkatan dan memberi peran strategis pemuda dalam membangun internasional;
  - 2) Memberikan ruang dan dukungan dana secara maksimal kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk melakukan :
    - a. Membuat peta jalan dan Destinasi pembangunan Kepemudaan di Sulawesi Tenggara;
    - b. Melakukan pendataan potensi pemuda dan remaja di Sulawesi Tenggara;
    - c. Membenahi tata kelola pembangunan Kepemudaan untuk :
      - a) Memaksimalkan pelaksanaan SDGs;
      - b) Meningkatkan indeks pembangunan pemuda di Sulawesi Tenggara;
    - d. Terwujudnya data Kepemudaan secara akurat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
    - e. Dapat menguatkan peran untuk melakukan koordinasi antara lintas sektor.
  - 3) Pembinaan Organisasi Kepemudaan
    - a. Belum terwujudnya dana yang memadai sehingga organisasi Kepemudaan tidak dapat tersentuh secara merata ;
    - b. Terjadinya perpecahan pada internal organisasi Kepemudaan ;
    - c. Angka partisipasi pemuda dalam organisasi sangat rendah;
    - d. Angka partisipasi dan kepemimpinan pemuda sangat rendah;
  - 4) Pembinaan gerakan pramuka  
Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga diberikan ruang untuk menata dan melakukan pembinaan secara terpadu dengan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka, untuk :
    - a. Untuk mengetahui secara langsung angka partisipasi pemuda dalam kegiatan kepramukaan;
    - b. Merancang naskah atau dokumen terkait pelaksanaan kegiatan kepramukaan di daerah.
2. Pelaksanaan program keolahragaan khususnya pembinaan olahraga prestasi yang telah dilakukan Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara, antara lain:

Secara normatif dan idealnya pembinaan olahraga di Sulawesi Tenggara dalam rangka mendorong peningkatan prestasi olahraga :

  - 1) Harus *clear* pemetaan cabang olahraga unggulan daerah Sulawesi Tenggara yang telah mempertimbangkan berbagai aspek penunjang

atau pendukungnya yakni potensi SDM atlet dan pelatih yang dijamin secara selektif dan profesional berdasarkan standarisasi masing-masing, dukungan pemangku kepentingan terkait sarana dan prasarana latihan, dukungan stimulasi bagi pelatih dan atlet.

- 2) Penguatan struktur kelembagaan pengurus cabang Olahraga dan peningkatan SDMnya dalam rangka melakukan program pembinaan secara berjenjang dan berkesinambungan yang di implementasikan mulai dari pembentukan klub-klub Olahraga di usia pelajar, dewasa sampai kategori atlet profesional dengan pendekatan potensi masing-masing daerah Kabupaten/Kota yang spesifik yang di dasarkan pada hasil pemanduan dan identifikasi bakat para atlet serta ketersediaan pelatih yang memiliki kompetensi kepelatihan.
  - 3) Peran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyiapan anggaran untuk melakukan Try Out, melaksanakan kompetisi single event dan multi event serta menyiapkan anggaran untuk mengikuti berbagai kegiatan nasional single event dan multi event sehingga berimpact pada lahirnya atlet-atlet berprestasi di Sulawesi Tenggara dapat masuk menjadi atlet Nasional/Pelatnas.
3. Masukan dan usulan Pemerintah Sulawesi Tenggara terkait penyusunan Desain Besar Pemuda yang tengah disusun oleh Kemenpora RI
- 1) Mengetahui dan mengurai akar masalah tata kelola pembangunan Pemuda;
  - 2) Dapat membenahi tata kelola pembangunan Kepemudaan;
  - 3) Mengurai secara konkrit peran penting keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah;
  - 4) Dimuat secara detail dan tegas tentang peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kepemudaan;
  - 5) Dimuat secara tegas arah dan kebijakan pembangunan daerah dalam pembangunan Kepemudaan;
  - 6) Dimuat tentang sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan pembangunan Kepemudaan;
  - 7) Dimuat secara tegas persentase dan APBD pada Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan pembangunan Kepemudaan.
  - 8) Harus ada langkah-langkah konkrit dalam rangka proses pembinaan kepemudaan di Sulawesi Tenggara.
  - 9) Dukungan dana, dalam rangka peningkatan kepemudaan.

#### **E. Bidang Perpustakaan**

1. Kadinis Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan secara tertulis bahwa Pemda sangat mendukung upaya menjadikan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya Pergub Nomor 9 Tahun 2017 tentang Sinergitas Pemberdayaan Masyarakat melalui Transformasi Perpustakaan Provinsi Sultra. Namun mulai menjadi mitra Program Transformasi Berbasis Inklusi Sosial sejak 2020.
2. Evaluasi layanan perpustakaan pada masa pandemi dan pasca pandemi, disampaikan sebagai berikut:
  - 1) Masa pandemi:
    - a. Berkurangnya pemustaka akibat penutupan layanan onsite.

- b. Akses fisik ke sumber informasi tercetak berkurang signifikan.
  - c. Penerapan Layanan berbasis *New Normal*.
- 2) Pasca pandemi:
    - a. Memaksimalkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
    - b. Membangun akses ke sumber-sumber elektronik (iSultra dan E-resources)
    - c. Aktif di sosial media sebagai sarana komunikasi gratis dengan pemustaka
  3. Sebagai mitra Program Transformasi Berbasis Inklusi Sosial dari Perpustnas RI, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sultra pada tahun pertama (2020) melibatkan 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kolaka Utara, Bombana, dan Muna. Pada tahun kedua (2021) menyebar ke 13 desa di ketiga kabupaten tersebut, dengan rincian, Kabupaten Kolaka Utara 5 desa, Kabupaten Bombana 5 desa, dan Kabupaten Muna 3 desa. Tahun ketiga (2022) melibatkan 5 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, Buton, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau.
  4. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun telah melibatkan 10.103 orang dalam 501 kegiatan dalam Program Transformasi Berbasis Inklusi Sosial, antara lain belajar bahasa Inggris, *story telling*, merajut, pelatihan marketing *online*, bimbingan belajar mengaji, dll.
  5. Prestasi yang telah diperoleh sebagai Mitra Program Transformasi Berbasis Inklusi Sosial, antara lain:
    - 1) Kolaka Utara dua kali menjadi Perpustakaan Terbaik dalam implemetasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
    - 2) Desa Lambuno Kabupaten Kolaka Utara menjadi Perpustakaan Desa Terbaik.
    - 3) Secara nasional Provinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam 6 Besar Kegiatan Pelibatan Masyarakat.
    - 4) Hasil Peer Learning Meeting Provinsi Sulawesi Tenggara mitra desa dan kabupaten sudah menghasilkan Produk baik makanan maupun kerajinan tangan.
  6. Evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, antara lain:
    - 1) Sosialisasi UU KCKR
    - 2) Focus Group Discussion dengan Wajib Serah
    - 3) Hunting KCKR di kabupaten/kota
    - 4) Penghargaan Penulis Sulawesi Tenggara
    - 5) Membuat Pojok Sultra sebagai Pajangan Hasil Karya Penulis Sulawesi Tenggara
  7. Masukan terkait pelaksanaan fungsi deposit Perpustakaan Umum Daerah, yaitu:
    - 1) Perpustakaan Provinsi perlu optimalisasi pelestarian fisik dan isi koleksi serah simpan.
    - 2) Perpustakaan Provinsi perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban serah simpan.
    - 3) Optimalisasi Pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.



### III. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Pembahasan yang dilakukan di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, antara lain disampaikan sebagai berikut:

**A. Gubernur Sulawesi Tenggara** membuka diskusi dan pembahasan dengan menyampaikan terima kasih atas berkenannya Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Besar harapan masyarakat Sulawesi Tenggara, atas kunjungan ini dapat membawa manfaat dan perbaikan terhadap pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga serta perpustakaan.

**B. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Tenggara** menyampaikan secara lisan, bahwa pasca pandemi di tahun 2022, mulai dirasakan kembali kebangkitan pariwisata di Sulawesi Tenggara meskipun jumlah angka kunjungan masih jauh dari kondisi pada tahun 2018-2019.

- 1) Masyarakat pariwisata Sultra merasa sangat terbantu dengan program-program pembinaan yang diberikan Kemenparekraf, diantaranya program Desa Wisata. Program ini cukup dirasakan dan menggairahkan kepariwisataan di tingkat desa. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton dari destinasi wisata yang ada di sekitarnya, tapi dengan adanya Desa Wisata, masyarakat desa dapat merasakan dampak peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.
- 2) Saat ini jumlah desa wisata di provinsi Sultra yang mengikuti Jejaring Desa Wisata (JADESTA) sudah berjumlah 236 desa wisata. Tahun 2021 sekitar 60 desa wisata yang masuk dalam jejaring tersebut. Seluruh desa yang terdaftar dapat mengikuti lomba untuk mendapatkan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Saat ini sudah masuk pada tahapan 50 besar. Adanya ruang penggunaan anggaran Dana Desa untuk membangun sarana kepariwisataan di Desa Wisata serta dorongan dari Menparekraf RI mengunjungi setiap Desa Wisata, memicu peningkatan jumlah desa yang membangun Desa Wisata. Untuk tahun 2022, terdapat 2 Desa Wisata Sultra, Desa Wisata Air Terjun Moramo Sumber Sari Konawe Selatan dan Desa Wisata Limbo Wolio Kota BauBau, desa ini terletak di dalam Benteng Keraton Buton Pulau BauBau, kedua desa tersebut berhasil masuk tahapan 50 besar lomba desa wisata pada ADWI Tahun 2022.
- 3) Para pelaku Ekraf Sultra juga mendapatkan bantuan hibah untuk subsektor Fotografi sebesar 20 juta rupiah dan Film 50 juta rupiah. Program ini sangat membantu pelaku ekraf dan menggairahkan kembali sektor perfilman dan fotografi di Sultra.
- 4) Untuk menggairahkan kembali kepariwisataan di Sulawesi Tenggara, rencananya akan dilaksanakan 5 event, namun baru 1 event yang dilaksanakan yaitu Napak Tilas Oputa Yi Koo – Sultan Himayatuddin Muhmmad Saydi – Sultan Buton ke-20 dan ke-23, Pahlawan Nusantara dari Buton. Even ini dilaksanakan pada April 2022 merupakan even pembuka yang dilaksanakan di pulau Buton. Kelima event pariwisata yang direncanakan tidak semuanya disambut optimis oleh para Kepala Daerah. Mereka tidak yakin even-even tersebut mampu membangkitkan pariwisata di Sulawesi Tenggara. Untuk itu mohon dukungan dari Kemenparekraf RI agar dapat menyakinkan adanya peluang untuk membangkitkan perekonomian di daerah melalui even pariwisata.

- 5) Sulawesi Tenggara memiliki salah satu destinasi yang ditetapkan sebagai Destinasi Prioritas AKA Bali Baru, yaitu Wakatobi. Namun setelah acara Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 pada Juni 2022, maskapai Wings Air menghentikan rute penerbangan dari Kendari ke Wangi-Wangi (Wakatobi), karena tingginya harga avtur. Untuk itu mohon adanya kebijakan yang memberikan kemudahan akses penerbangan ke Wakatobi. Jika dibandingkan Labuan Bajo, dapat diakses langsung dari Jakarta, Makassar, Mataram, Bali, dan Surabaya.

**C. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sultra** menyampaikan secara lisan, bahwa perlunya penguatan anggaran pembinaan melalui APBN untuk Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) di Sulawesi Tenggara, mengingat alokasi anggaran dari Kemenpora terus menurun, tahun 2021 sebesar 2,25 miliar dan tahun 2023 sebesar 1,9 miliar. PPLP merupakan program Kemenpora yang bertujuan membangun talenta-talenta olahraga prestasi di usia muda. Setiap Dinas Pemuda dan Olahraga di setiap provinsi merupakan penyelenggara PPLP untuk menampung para atlet yang memiliki prestasi di berbagai cabang olahraga.

**D. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Tenggara** menyampaikan secara lisan, bahwa tahun 2022, Pemda Provinsi Sultra telah menyelesaikan pembangunan gedung layanan perpustakaan umum bertaraf internasional dengan pembiayaan melalui APBD murni dengan total dana sekitar 100 miliar rupiah. Saat ini sudah masuk tahap penyelesaian (*finishing*) di luar konstruksi. Untuk itu mohon adanya bantuan dana interior pada TA 2023 dari Perpustakaan RI. Meskipun Perpustakaan RI telah memberikan bantuan melalui DAK dan Dekon, namun belum mencukupi untuk penyelesaian tahap *finishing*, mengingat pembangunan perpustakaan ini merupakan program Gubernur Sultra yang nantinya akan menjadi salah satu ikon Provinsi Sulawesi Tenggara.

**E. Kadinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara** yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran, mengingat Kadinas merangkap Pj. Sekda yang sedang memimpin diskusi pembahasan dengan Tim Kunker Komisi X DPR RI.

Disampaikan data-data capaian pendidikan di Sulawesi Tenggara sebagai berikut, saat ini capaian indikator utama yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah sebesar 69,29%, sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah sebesar 104,11%, rata-rata lama sekolah 9,04 tahun, sedikit diatas rata-rata nasional 8,48 tahun. Angka harapan lama sekolah 13,65 tahun.

#### **Bidang Pendidikan**

- 1) Siswa yang mendapatkan nominasi PIP pada tahun 2022 berjumlah 30.417 siswa dari total siswa 10.261 siswa SMA/SMK.
- 2) Program dari APBD berupa beasiswa tidak mampu sebanyak 1536 siswa dengan anggaran 1,536 miliar rupiah.
- 3) Pelaksanaan Dana BOS berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, hanya selalu terjadi kendala di akhir tahun adalah pelaporan aset, karena aset untuk dana BOS terkonsentrasi di Badan Layanan Aset Daerah Provinsi Sultra. Asetnya kecil-kecil ini menjadi kendala bagi Pemda Provinsi Sultra dalam pelaporan LPPD.

- 4) DAK SMA, SMK dan SLB sudah tersalurkan dengan baik, namun saat ini sangat membutuhkan pembangunan banyak Unit Sekolah Baru (USB) SMA dan SMK baik di daerah 3T maupun di daerah padat penduduk. Untuk Tahun 2022, Pemda Provinsi Sultra mengatasinya melalui APBD membangun 3 USB. Mohon bantuan dari Pemerintah Pusat cq Kemendikbudristek RI untuk dapat memenuhi kebutuhan USB di daerah 3T dan padat penduduk.
- 5) Sarana Prasarana sekolah banyak yang telah rusak termakan usia, sehingga membutuhkan rehabilitasi. Pada tahun-tahun sebelumnya ada dana revitalisasi yang disalurkan melalui Kementerian PU-PR, namun sampai saat ini Pemda Provinsi Sultra belum pernah mendapatkan dana revitalisasi tersebut terutama untuk infrastruktur yang berskala besar. Pemda Provinsi Sultra sudah mengajukan surat ke Komisi V DPR RI terkait infrastruktur ini, namun sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban.
- 6) Kendala penyelenggaraan PKLK terkait ketersediaan guru yang memiliki kompetensi PKLK yang masih sedikit di Sultra. Pemda mengatasi melalui Program Kerja Sama dengan Universitas Negeri Makassar, dengan mengirimkan 20 guru SLB dari guru umum untuk mengikuti S-1 kedua utk prodi PKLK.
- 7) Masih terkait PKLK, saat ini Provinsi Sultra telah memiliki Pusat Layanan Autis (layanan satu-satunya di seluruh Sultra). Sudah melayani terapi 200 anak autis, dan masih terdapat 150 daftar tunggu anak autis yang memerlukan layanan, namun tidak dapat terpenuhi karena keterbatasan tenaga terapis. Saat ini Terapis yang ada sebagian besar adalah Tenaga Honorer melalui APBD.

**F. Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Tenggara** menyampaikan bahwa Kurikulum Merdeka menawarkan 2 (dua) opsi, pertama, yang terkait Sekolah Penggerak, dan kedua terkait implementasi Kurikulum Merdeka dengan 3 (tiga) pilihan, yaitu (i) mandiri belajar, (ii) mandiri berubah, dan (iii) mandiri berbagi. Penyelenggaraan pendidikan di Sultra masih didominasi oleh mandiri belajar dan mandiri berubah. Kunjungan Komisi X DPR RI merupakan harapan besar agar ditindaklanjuti ke Kemendikbudristek agar sekolah-sekolah yang masih dalam kondisi mandiri belajar dan mandiri berubah dapat didorong menjadi selevel dengan sekolah mandiri berbagi dan Sekolah Penggerak.

**G. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tenggara** menyampaikan data terkait pengguna kurikulum mandiri kurang lebih 1197 sekolah. Sekolah Penggerak berjumlah 111 sekolah, tersebar di 17 kabupaten/kota. Kegiatan yang sudah dilakukan yaitu melakukan lokakarya yang semula dilakukan di hotel, saat ini karena keterbatasan anggaran dilaksanakan di sekolah. Kunjungan Komisi X DPR RI merupakan harapan besar untuk mendorong adanya tambahan anggaran untuk kegiatan Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak di Sulawesi Tenggara.

**H. Wakil Rektor III Universitas Haluoleo** menyampaikan:

- 1) Pasal 74 ayat (1) UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan pada PTN wajib menerima calon mahasiswa afirmasi dan 3T. Universitas Haluoleo, tahun 2022 menerima 97 mahasiswa afirmasi Papua dan 3T. Permasalahannya perguruan tinggi tidak mendapatkan insentif atas tanggung jawab yang telah dilaksanakan. Insentif ini perlu

sebagai motivasi bagi perguruan tinggi untuk menjangkau lebih banyak mahasiswa afirmasi dan 3T. Kewajiban ini hendaknya masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga perguruan tinggi yang melaksanakan mendapatkan peluang untuk memperoleh insentif. Untuk itu diharapkan Komisi X DPR RI dapat mendorong Kemendikbudristek RI untuk meninjau kembali Kepmendikbudristek Nomor 754P Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan LLDIKTI di Lingkungan Kemendikbudristek.

- 2) Pembinaan Mahasiswa di bidang olahraga.  
UU Keolahragaan mengamatkan bahwa kewajiban pendanaan olahraga ada di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat. Namun kenyataannya mahasiswa yang akan mengikuti Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional, biayanya ditanggung oleh perguruan tinggi yang membina. Mahasiswa yang berprestasi olahraga namun berada di PTS mengalami kesulitan pembiayaan dalam mengikuti POMNAS.
- 3) Masukan terhadap penyelenggaraan pariwisata, agar mengutamakan keselamatan pengunjung destinasi wisata. Agar menempatkan penjaga-penjaga wisata yang mengawasi area bahaya atau area yang berpotensi membahayakan wisatawan.

#### **I. Tanggapan Anggota Komisi X DPR RI**

1. Anggota Komisi X DPR RI, Dra. Hj. Tina Nur Alam, M.M. menyampaikan bahwa secara umum seluruh masukan dan aspirasi yang disampaikan para pemangku kepentingan sudah dicatat dan akan menjadi bagian dari materi rapat kerja dengan semua mitra Komisi X DPR RI. Selain kebutuhan USB SMA yang mendesak di daerah 3T, kebutuhan lainnya yang juga mendesak adalah pembangunan asrama bagi Atlet Dayung mengingat Provinsi Sultra sudah memberikan medali emas untuk Cabor Dayung pada SEA Games 2021 di Vietnam. Masuknya 2 (dua) Desa Wisata dalam 50 besar ADWI 2022, hendaknya menjadi motivator bagi desa wisata lainnya di Provinsi Sultra agar mendapatkan penghargaan di tahun-tahun berikutnya. Diharapkan adanya sharing dana APBD dalam penyelesaian gedung layanan perpustakaan Provinsi Sultra.
2. Anggota Komisi X DPR RI, Desi Ratnasari, M.Si., M.Psi. memastikan penyampaian aspirasi insentif bagi perguruan tinggi yang sudah mengakomodir mahasiswa dari 3T sehingga menjadi nilai tambah bagi PTN khususnya yang memang bisa melaksanakan tugas tersebut untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal lain yang belum disampaikan adalah terkait masukan terhadap RUU Revisi UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan perkembangan Ekraf, dari Dinas Pariwisata dan Ekraf. Terkait aksesibilitas ke Wakatobi menjadi hal yang penting untuk menjadi perhatian Menparekraf RI dengan pengawalan Ibu Tina Nur Alam. Updating informasi dan promosi destinasi wisata Sultra. Kami juga ingin mendengarkan mengenai proses digitalisasi perpustakaan, perkembangan literasi Sultra dan transformasi perpustakaan ke arah digital, terutama dukungan terhadap perpustakaan sekolah. Penjelasan dan paparan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cukup baik dilengkapi dengan data faktual dan lengkap, namun kami belum mendengarkan terkait Guru PPPK, Guru Honorer, dan perkembangan budaya di Sultra.
3. Anggota Komisi X DPR RI, Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si mengapresiasi pesatnya pembangunan di Kota Kendari sejak 2013. Terkait

kebutuhan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana sekolah telah dialihkan ke Komisi V dengan mitra kerjanya yaitu Kementerian PU-PR RI. Mengapresiasi pembangunan gedung perpustakaan 7 lantai berkualitas internasional, ini akan menjadi ikon di Sulawesi Tenggara, kami mendukung adanya dana imbangan Pemda dan mengusulkan tambahan dana dari Perpunas RI. Untuk penyelenggaraan pariwisata di Sultra agar lebih memperhatikan keselamatan wisatawan saat berada di kawasan destinasi wisata.

4. Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba Gah, S.E. menyampaikan 3 hal, yaitu (i) terkait substansi apa saja yang perlu menjadi revisi dalam UU Sisdiknas, (ii) konfirmasi terkait Guru PPPK, apakah formasi Guru PPPK diusulkan oleh daerah, yang menetapkan Pemerintah Pusat atau formasi Guru PPPK ditetapkan Pemerintah Pusat. Hal ini saya sampaikan mengingat di NTT, Kepala Daerahnya menginformasikan bahwa formasi PPPK ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Dan (iii) terkait pencairan PIP biasanya terkendala aktivasi rekening, mengingat saat ini sudah mendekati akhir bulan Oktober, saya sarankan Dinas Dikbud untuk segera minta data berapa jumlah siswa yang belum aktivasi, waktunya tinggal sedikit sebelum 31 Desember 2022.

#### **J. Tanggapan dari Pejabat Pendamping**

1. Ses.Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbudristek RI, Dr. Sutanto, S.H., M.A., menyampaikan terkait kebutuhan pembangunan USB, kebutuhan ini sudah ada dalam menu DAK Fisik. Pemda/Dinas Pendidikan bisa mengusulkan melalui Skema DAK Fisik terutama untuk SMA, SMK, dan SLB. Untuk sekolah negeri, syaratnya harus punya lahan yang sudah atas nama Pemerintah Daerah. Pembangunan USB biasanya diutamakan untuk daerah bencana atau APK rendah, selain itu perlu didukung data yang kuat. Jika persyaratan dan dukungan data yang kuat, Pemda dapat mengajukan anggaran berapapun, karena DAK Fisik cukup besar, sekitar 17 triliun dan tidak ada kuota per daerah.
2. Sekretaris Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf RI, Ir. Oni Yulfian, MBTM, menyampaikan beberapa hal, yaitu:
  - a. Wakatobi memang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata. Wakatobi selanjutnya dikategorikan sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Status Wakatobi harus ditindaklanjuti oleh Pemda yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPPARDA) Provinsi Sultra. Rencana Induk ini menjadi dasar pengembangan pariwisata, yaitu (i) pengembangan destinasi, (ii) pemasaran, hal ini memerlukan kajian yang mendalam, (iii) industri, yang merupakan link and match antara pariwisata dan ekraf yang akan menggerakkan industri, dan (iv) SDM. Keempat dasar pengembangan pariwisata ini harus tercermin dalam RIPPARDA. Rencana Induk ini merupakan amanat UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
  - b. Memberikan apresiasi dan selamat atas terpilihnya 2 (dua) Desa Wisata dalam 50 besar ADWI 2022, mudah-mudahan keduanya atau salah satu dapat masuk menjadi 10 Top ADWI 2022.
  - c. Dukungan dari Kemenparekraf kepada Provinsi Sultra pada Tahun 2022 sebesar 34,83 miliar, terdiri dari DAK Pariwisata sebesar 24 miliar

untuk Kota Kendari dan Kabupaten Wakatobi, dan program-program dukungan sebesar 10 miliar.

- d. Berhentinya jalur penerbangan ke Wakatobi, sampai saat masih menjadi agenda dalam Rapim di Kemenparekraf. Alokasi anggaran yang ada untuk rapat-rapat koordinasi di Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Rapat ini diarahnya untuk adanya dukungan terhadap dibukanya kembali penerbangan ke Wakatobi.

#### **K. Tanggapan dari Gubernur Sulawesi Tenggara**

1. Prinsipnya formasi guru PPPK diusulkan oleh daerah lalu masuk ke Pemerintah Pusat, yang menjadi masalah adalah distribusi atau penempatan tidak selalu kembali ke daerah yang mengusulkan, sehingga daerah tetap terjadi kekurangan guru. Untuk itu Komisi X DPR RI dapat membantu, agar formasi yang usulkan tetap kembali kepada daerah yang mengusulkan.
2. Terkait pemutusan penerbangan ke Wakatobi secara sepihak oleh maskapai penerbangan, hal tersebut perlu mendapatkan perhatian Komisi X DPR RI untuk mendorong Kemenparekraf berkoordinasi dengan K/L lain.
3. Akan mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera membuat proposal untuk setiap kebutuhan di sektor pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga serta perpustakaan, yang sudah disampaikan dalam forum rapat maupun disampaikan secara tertulis.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan deskripsi di atas, dari berbagai pertemuan dan kunjungan yang telah dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

##### **A. Bidang Pendidikan**

Meski secara umum pelaksanaan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah berjalan baik, kondisi bangunan sekolah dan sarana prasarannya rusak dalam skala besar. Beberapa masukan dan usulan, antara lain:

1. Meningkatkan alokasi DAK Fisik SMA, SMK dan SLB, karena banyaknya sarana prasarana sekolah yang rusak dimakan usia (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dll)
2. Meninjau kembali persyaratan 1 kecamatan 1 USB pada menu DAK SMA/SMK, mengingat pada kecamatan padat penduduk diperlukan lebih dari 1 USB.
3. Terkait pelaksanaan rekrutmen Guru PPPK, terdapat 24 guru yang lulus seleksi pada tahun 2021, dan 528 guru lulus pada tahun 2022, namun Pemerintah Pusat belum mengangkat Guru ASN untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, sejak tahun 2020. Saat ini Sulawesi Tenggara kekurangan sekitar 5000 orang. Untuk tahun 2023, Pemda menyampaikan formasi Guru PPPK sebanyak 1.462 orang.
- 4) Terkait kewajiban PTN untuk menerima mahasiswa afirmasi dan 3T sesuai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kewajiban tersebut hendaknya masuk sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga perguruan tinggi yang melaksanakan mendapatkan peluang untuk memperoleh insentif. Untuk itu perlu meninjau kembali Keputusan Mendikbudristek Nomor 754 P Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan LLDIKTI di Lingkungan Kemendikbudristek.

- B. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,** Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara meminta Pemerintah Pusat c.q Kemenparekraf/Bapparekraf RI untuk berkoordinasi dengan K/L terkait agar membuka kembali rute penerbangan Kendari-Wakatobi, dan kemungkinan dibukanya rute dari bandara lainnya ke Wakatobi. Hal ini diperlukan, karena sejak Juni 2022, *Wings Air* sebagai satu-satunya maskapai penerbangan ke Wakatobi menghentikan rute penerbangan dari Kendari ke Wangi-Wangi (Wakatobi), karena tingginya harga avtur.
- C. Bidang Olahraga,** Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara meminta Pemerintah Pusat c.q Kemenpora RI memberikan penguatan anggaran pembinaan melalui APBN untuk Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) di Sulawesi Tenggara, mengingat alokasi anggaran dari Kemenpora terus menurun, tahun 2021 sebesar 2,25 miliar dan tahun 2023 sebesar 1,9 miliar.
- D. Bidang Perpustakaan,** Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara meminta Pemerintah Pusat c.q Perpusnas RI memberikan bantuan dana interior pada tahun 2023, mengingat dana tersebut akan digunakan menyelesaikan tahap akhir pembangunan gedung layanan perpustakaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

## **V. REKOMENDASI**

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemedikbudristek RI dan Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperhatikan dan menindaklanjuti masukan dan usulan bidang pendidikan sebagaimana telah tercantum dalam kesimpulan, antara lain:
  - a. Meningkatkan alokasi DAK Fisik SMA, SMK dan SLB, karena banyaknya sarana prasarana sekolah yang rusak dimakan usia (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dll).
  - b. Meninjau kembali Keputusan Mendikbudristek Nomor 754 P Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan LLDIKTI di Lingkungan Kemendikbudristek, agar kewajiban menerima mahasiswa afirmasi dan 3T, masuk menjadi sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga perguruan tinggi yang melaksanakan mendapatkan peluang untuk memperoleh insentif.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk segera menyelesaikan permasalahan rute penerbangan ke Wakatobi, sehingga pengembangan destinasi pariwisata prioritas Wakatobi tidak terhenti.
3. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI memberikan perhatian lebih terhadap pembinaan atlet pelajar di PPLP yang diselenggarakan oleh Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Komisi X DPR RI mendorong Perpusnas RI untuk mendukung Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyelesaikan pembangunan gedung layanan perpustakaan provinsi.

## **E. PENUTUP**

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi X DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sulawesi Tenggara, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 01 November 2022

Ketua Tim/  
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

TTD

**Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP**  
**A-338**